

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Amiruddin dan Zainal Askin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Eko Supriadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi*. Jakarta : Djambatan.
- Dyra Radhite Oryza. 2016. *Sertifikat tanah Rumah dan Perizinannya*. Yoyakarta : PT Suka Buku.
- Effendi Perangin. 1994. *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-pokok pengertian Hukum Adat*. Bandung : Alumni.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 177.
- J Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- M Arba. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang : PT. Singgalang Press.
- Ridwan. 2010. *Hak Milik*. Puwokerto : Stain Press.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajaali Pers.

Selo Soemarmo, Jufrina Rizal dan Desiree Zuraida. 1993. *Aspek-Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*. Jakarta : Penerbit Rajawali.

----- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*, cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Putusan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Solok (Unit VI) yang Terletak di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Seluas +130.346 Ha.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan

Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan(PPTKH)

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

C. Internet

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24713/SKRIPSI.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 19.45. WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/30104-ID-analisis-penetapan-kriteria-kawasan-hutan.pdf>. Diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 15.00. WIB.

<http://kbbi.web.id/hutan>. Diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 17.00. WIB.

<http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/RP04357.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 15,00. WIB.

